

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Globalisasi telah membawa dampak multidimensi terhadap kehidupan bangsa, termasuk terbukanya arus ideologi transnasional yang berpotensi menggeser nilai-nilai lokal. Dalam konteks Indonesia, warga negara yang bermukim di luar negeri—seperti pekerja migran dan mahasiswa—menjadi kelompok rentan terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak selaras dengan Pancasila. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penetrasi ideologi transnasional yang masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ideologi-ideologi asing seperti komunisme, radikalisme, dan liberalisme semakin terbuka aksesnya melalui media digital, pendidikan internasional, dan migrasi penduduk. Di tengah derasnya arus globalisasi, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, baik sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), mahasiswa, profesional, maupun pejabat, menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Kerentanan tersebut akibat pengaruh lingkungan dan budaya bangsa asing produk ideologi transnasional yang dialami WNI di luar negeri setiap hari. Akibatnya ada WNI yang ikut meniru menerapkan budaya asing tersebut (terpapar pasif) dan ada yang sudah dimanfaatkan menjadi agen penyebar ideologi transnasional di Indonesia oleh unsur pemerintah asing pemilik ideologi (terpapar aktif) baik melalui pendekatan (*softpower*) maupun pemaksaan dengan kekerasan/terorisme. Itulah salah satu alasan pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88). Menurut data dari Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2024), ditemukan sejumlah kasus WNI di luar negeri yang menunjukkan perilaku intoleran, permisif, radikal, dan bahkan terlibat dalam

gerakan yang mendukung ideologi non-Pancasila. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika diketahui bahwa banyak dari WNI tersebut tidak memiliki bekal pemahaman ideologi Pancasila yang memadai ketika di Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri.

Banyak WNI yang dikirim belajar atau menjadi PMI dan profesional yang bekerja ke luar negeri, tidak mendapatkan bekal pendidikan penguatan karakter kebangsaan yang cukup. Kurang maksimalnya pendidikan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) selama 25 tahun (2020 – 2025) di dunia akademik dan di masyarakat menyebabkan WNI di luar negeri tidak memiliki fondasi ideologis yang kuat untuk menghadapi derasnya pengaruh nilai-nilai asing. Dalam banyak kasus, mereka justru menjadi agen penyebar ideologi transnasional saat kembali ke Indonesia. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketahanan ideologi bangsa, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik ideologis di dalam negeri. Untuk menjawab masalah ancaman keamanan ini, pada tahun 2017 Presiden mendirikan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) di Istana Presiden. Setahun kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Selanjutnya dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, kepada BPIP telah diberikan mandat oleh Presiden untuk melakukan institusionalisasi dan internalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Namun, implementasi PIP hingga saat ini masih terbatas di dalam negeri dan belum menyentuh secara sistematis komunitas WNI di luar negeri. Padahal, urgensi pembinaan ideologi bagi WNI di luar negeri sudah sangat mendesak mengingat besarnya tantangan ideologis yang mereka hadapi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayah (2021:75), pelaksanaan PIP harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari aparat pemerintah dan kemudian diperluas ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk diaspora Indonesia. Dalam konteks inilah, penulis memandang perlunya pemerintah Indonesia segera memiliki strategi Internasionalisasi PIP untuk

memperkuat pendidikan karakter kebangsaan WNI di luar negeri agar tidak terpapar ideologi transnasional.

Lebih dari itu, WNI di luar negeri yang memiliki karakter Pancasila diharapkan mampu menjadi Agen propaganda dan Duta ideologi Pancasila di tingkat global. Gagasan Internasionalisasi PIP ini sejalan dengan pemikiran Ir. Sukarno dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada tahun 1960 yang berjudul *"To Build the World Anew"*. Dalam pidato tersebut, Presiden Sukarno mengusulkan Pancasila menjadi ideologi alternatif dunia di tengah konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Presiden Sukarno juga meminta kepada pihak PBB agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB sebagai ideologi perdamaian untuk menengahi perseteruan kedua Blok tersebut. Gagasan ini kemudian diperkuat oleh publikasi BPIP dalam buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini yang merangkum hasil pelaksanaan 5 (lima) seri seminar kebangsaan, dimana peneliti termasuk dalam Tim Pelaksana BPIP. Buku Pancasila dari Indonesia untuk Dunia ini yang merekomendasikan perlunya diplomasi ideologi Pancasila di panggung internasional.

Selain secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbagai ideologi transnasional yang menyusup ke dalam ruang-ruang publik nasional juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) nasional dan HAM universal/internasional, khususnya dalam hal mendorong polarisasi, intoleransi, dan dalam kasus ekstrem, konflik yang memicu perlombaan senjata seperti yang terjadi pada masa Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejarah kerap kali berulang, dimana ideologi asing kembali menciptakan fragmentasi di tengah masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2019, dinamika sosial-politik nasional semakin menunjukkan keterbelahan pandangan ideologis antar kelompok masyarakat. Akar dari konflik ini dapat ditelusuri pada ketegangan antara pendukung ideologi Pancasila yang berpihak kepada pemerintah yang sah

melawan kelompok-kelompok yang terinfiltrasi oleh ideologi transnasional asing.

Kelompok yang terpapar ideologi asing ini bukan hanya menyuarakan ketidaksepakatan terhadap pemerintah, tetapi juga membawa agenda ideologis transnasional yang berpotensi merongrong integritas nasional karena didanai oleh sponsor asing. Yang mengkhawatirkan, banyak dari mereka merupakan WNI dan diaspora yang sebelumnya bermukim di luar negeri, dimana mereka terpapar langsung pada sistem nilai dan budaya politik negara asing yang kontradiktif terhadap Pancasila. Dalam hal ini, mereka secara tidak sadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan ideologis asing di dalam negeri. Merespon fenomena ini, strategi internasionalisasi PIP menjadi sangat relevan untuk diterapkan, terutama dengan mengacu pada pendekatan teori intermestik/*intermestic theory (interconnected international and domestic affairs)* yang diperkenalkan oleh Bayless Manning (1979). Dalam artikelnya di Jurnal AS *Foreign Affairs*, Manning menyatakan bahwa: *"foreign policies have such a significant direct effect on the domestic sphere, that the deliberations behind them are rooted in both international and domestic considerations."*

Pernyataan ini berarti: "kebijakan luar negeri berdampak langsung kepada keadaan domestik negara, yang latar belakang perenungannya berakar kepada pertimbangan internasional dan domestik." Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kebijakan luar negeri/internasional dan dinamika domestik suatu negara. Teori intermestik kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Frederick Logevall yang menekankan bahwa kebijakan internasional tidak dapat dilepaskan dari implikasi domestiknya. Di satu sisi, Manning menekankan garis batas antara kebijakan ekonomi domestik dan internasional. Sedangkan di sisi lain, Logevall memperluas cakupan konsep tersebut pada dinamika diskursus dalam negeri yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri. Dengan demikian, strategi internasionalisasi PIP harus dipandang tidak hanya sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan ideologis

nasional dari dalam dan luar negeri secara simultan dalam kerangka kepentingan geostrategis dan geopolitis Indonesia.

Dalam hal ini, konsep intermestik sejalan dengan pandangan Harland Cleveland dalam bukunya *Internationalization of Domestic Affairs* (1979), yang menyatakan bahwa: "*the content of international affairs is now mostly the internal affairs of still sovereign nations.*" Pengertiannya adalah bahwa internasionalisasi kini mencakup isu-isu politik, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan moral yang berdampak langsung terhadap stabilitas domestik suatu negara. Salah satu manifestasi nyata dari pendekatan intermestik dalam kebijakan nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang dikenal dengan Visi Indonesia Emas. Pemerintah Indonesia menetapkan agenda besar untuk menjadi negara maju melalui pembangunan karakter bangsa, terutama generasi muda, yang harus dibekali dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal maupun nonformal. Di sisi lain, pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; ekonomi yang berdaya saing; serta stabilitas politik dan keamanan nasional yang kokoh.

Kesuksesan Indonesia dalam menerapkan prinsip intermestik terlihat dalam pencapaiannya menjadi Presidensi *Government 20* (G20) pada tahun 2022, merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memperoleh kehormatan tersebut. Hal ini mencerminkan pengakuan global atas kemampuan Indonesia dalam memadukan kepentingan nasional dengan dinamika global. Beberapa indikator pengakuan dunia terhadap status Indonesia sebagai negara maju antara lain: perubahan status Indonesia oleh *World Trade Organizations* (WTO) dari negara berkembang menjadi negara maju, posisi Indonesia di peringkat kesepuluh dalam daftar *Purchasing Power Parity* (PPP) anggota G20, serta kemampuan Indonesia pulih lebih cepat dari pandemi *Corona Certificate of Vaccination Identification* (COVID-19) dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Selain itu, program *Belt and Road Initiative* (BRI) atau *One Belt One Road* (OBOR) yang dicanangkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT/Cina) juga menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik

dan ekonomi internasional dapat terintegrasi ke dalam kebijakan nasional dan sebaliknya (teori intermestik) .

Dalam konteks ini, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memanfaatkan hubungan strategis dengan Tiongkok dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam jalur perdagangan internasional dan logistik global. Dengan menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam jalur distribusi ekspor Cina, Indonesia tidak hanya meningkatkan peran regionalnya tetapi juga memperkuat daya tawarnya dalam percaturan geopolitik global. Dalam perspektif ini, internasionalisasi PIP merupakan bentuk internasionalisasi kepentingan dalam negeri yang didorong oleh semangat melindungi integritas ideologi nasional. Seperti dinyatakan oleh McAlessee dan Chapman (2018), kebijakan luar negeri dewasa ini semakin ditentukan oleh kepentingan domestik. Oleh karena itu, pendidikan ideologi Pancasila di luar negeri bukan hanya tugas moral, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kebijakan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa dalam tatanan global yang semakin kompetitif dan kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi internasionalisasi PIP yang relevan dan aplikatif, dengan pendekatan teori intermestik sebagaimana yang dikembangkan oleh Bayless Manning dan Frederick Logevall. Konsep intermestik menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan kebutuhan domestik, dalam hal ini pembinaan ideologi bangsa. Dengan kata lain, internasionalisasi PIP tidak hanya berfungsi sebagai diplomasi luar negeri, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ketahanan ideologi nasional dari luar ke dalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat strategi Sun Tzu tentang teori *pre-emptive strike*, yang berarti melakukan pencegahan dan pembinaan sejak dini sebelum ancaman ideologi asing masuk ke dalam negeri. Strategi ini menekankan pentingnya mencegah-tangkal ideologi transnasional di luar batas teritori, sebelum sempat masuk, berkembang dan mengganggu situasi di dalam negeri.

Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa internasionalisasi PIP adalah bentuk aktualisasi dari teori *character education* sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Lickona dan Ki Hajar Dewantara. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter harus dilakukan secara sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral dasar. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana membentuk manusia yang berkarakter dan cinta tanah air. Berdasarkan paparan di atas, penulis menilai bahwa internasionalisasi PIP bagi WNI (pekerja migran/PMI dan mahasiswa) di luar negeri adalah sebuah kebutuhan mendesak dan strategis. Tanpa adanya strategi ini, Indonesia berisiko mengalami degradasi ideologi Pancasila yang lebih parah, terutama jika generasi muda yang tinggal atau pernah tinggal di luar negeri justru menjadi agen perubahan ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi internasionalisasi PIP yang efektif, kontekstual, dan berbasis pada kondisi sosiologis WNI di luar negeri.

1.1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat kasus WNI pekerja migran, mahasiswa dan pejabat Indonesia di luar negeri yang mendukung ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Implikasinya, rumusan masalah penelitian disertasi ini adalah bagaimana Internasionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi WNI di luar negeri? Agar supaya lebih spesifik maka rumusan masalah tersebut dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran implikasi ideologi transnasional terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri?
- b. Bagaimana gambaran strategi Internasionalisasi PIP terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri?
- c. Bagaimana rumusan strategi Internasionalisasi PIP terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri agar memiliki karakter kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

- d. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Internasionalisasi PIP bagi WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri?

1.1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mendeskripsikan implikasi ideologi transnasional terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri.
- b. Mendeskripsikan strategi Internasionalisasi PIP terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri.
- c. Merumuskan strategi Internasionalisasi PIP terhadap WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri agar memiliki karakter kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- d. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Internasionalisasi PIP bagi WNI (PMI dan mahasiswa) di luar negeri.

1.1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan 4 (empat) manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Mengingat target dari penelitian ini adalah WNI yang bermukim di luar negeri, maka penelitian ini ditujukan untuk menyelaraskan antara 2 (dua) Teori Pendidikan Karakter untuk WNI sebagai *Grand Theory* dari penelitian ini. Teori pertama (Thomas Lickona) menekankan pentingnya usaha dalam membantu individu memahami, memperhatikan, dan menerapkan nilai-nilai etika inti. Teori kedua (Ki Hajar Dewantara) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di sekolah agar peserta didik memiliki kekuatan karakter yang baik, mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa, tidak mudah terprovokasi, dan mencintai tanah air. *Grand Theory* ini kemudian dihubungkan dengan *Middle Range Theory* yaitu Teori Intermestik yang dipadukan dengan Teori *Pre-emptive Strike* sebagai

strategi filsafat perang klasik yang menekankan tindakan proaktif dalam menghadapi ancaman sebelum terjadi serangan nyata.

Ancaman bagi WNI di luar negeri adalah pengaruh ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Strategi yang telah terbukti relevan tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter tersebut, dapat diterapkan untuk dijadikan strategi dalam melaksanakan pendidikan PIP di luar negeri menjadi Internasionalisasi PIP sebagai *Applied Operational Theory* untuk membentengi WNI di luar negeri dari ancaman ideologi transnasional. Secara teoritis, penelitian empiris ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang Pendidikan Umum dan Karakter, khususnya dalam mata kuliah seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Etika dan Karakter. Penelitian ini memperluas perspektif WNI mengenai integrasi antara nilai-nilai luhur bangsa dengan pendekatan strategis dalam pembentukan karakter, yang dapat diterapkan dalam konteks kebangsaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui seminar internasionalisasi PIP oleh Pemerintah kepada WNI di luar negeri adalah supaya memiliki wawasan kebangsaan dan menerapkan karakter Pancasila dalam tindakan sehari-hari dan setiap saat. Sehingga mereka imun terhadap pengaruh dan menjadi benteng terhadap ancaman gangguan ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Ideologi transnasional tersebut dapat dicegah tangkal saat masih di negaranya sebelum sempat dibawa masuk oleh WNI ke Indonesia. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) internasionalisasi PIP ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara setempat (negara akreditasi Perwakilan RI: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Konsulat Republik Indonesia (Konsulat RI).

c. Manfaat Praktik

Strategi dan teori *character education* dan teori *pre-emptive strike intermestic* dipraktekan dalam diklat internasionalisasi PIP kepada para WNI (pejabat, profesional, mahasiswa/pelajar dan PMI) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui (Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal RI (KJRI), Konsulat RI di negara akreditasi dan rangkapannya. Perwakilan RI dapat memasukan strategi internasionalisasi PIP ke dalam program pembinaan masyarakat Indonesia di negara akreditasinya yang mereka laksanakan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan BPIP mengadakan diklat ToT (*Training for Trainer*) atau seminar bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dan WNI. Selanjutnya mereka akan melakukan PIP kepada komunitas masyarakatnya di luar negeri dan diaspora, begitu seterusnya.

d. Manfaat *Issue* dan Aksi Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas program diklat PIP dalam meredam penyebaran ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta mengurangi potensi disinformasi dan keresahan sosial di masyarakat. Kelompok-kelompok kecil yang menyuarakan ideologi transnasional tersebut seringkali merupakan gabungan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjalankan reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Mereka memanfaatkan celah ketidaktahuan masyarakat, termasuk WNI yang tinggal atau belajar di luar negeri yang belum mendapatkan pembekalan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya penguatan strategi *pre-emptive* melalui penyelenggaraan diklat PIP secara kolaboratif bersama BPIP, terutama dalam program-program seperti "Pembumih Pancasila", "Pusat Studi Pancasila di Luar Negeri", serta "Sekolah Kader Pancasila" yang ditujukan bagi diaspora Indonesia, mahasiswa luar negeri, dan calon pemimpin muda.

Melalui kerja sama ini, pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara sistematis dan berkesinambungan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga untuk WNI di luar negeri agar mereka tetap memiliki imunitas ideologis terhadap paham-paham yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Selain itu, diklat PIP juga dapat diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat mayoritas yang Pancasilais (*silent majority*), agar lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial melalui jalur hukum dan edukasi publik, bukan dengan kekerasan atau konflik terbuka. Dengan sinergi antara pemerintah, BPIP, dan elemen masyarakat yang berkomitmen pada Pancasila, diharapkan stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional dapat terjaga secara inklusif dan berkeadaban.

1.2. Struktur Sistematis Disertasi

Dalam struktur sistematis disertasi ini, penulisannya menggambarkan kandungan tiap Bab, urutan penulisannya, serta keterkaitannya satu sama lain membentuk suatu kerangka utuh disertasi sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas kegiatan BPIP melakukan program institusionalisasi dan internalisasi PIP di luar negeri (internasionalisasi PIP). Terutama di negara-negara yang banyak didiami oleh WNI (pejabat, profesional, mahasiswa, pelajar dan PMI) di luar negeri dan diaspora. Internasionalisasi PIP dilakukan melalui seluruh KBRI, KJRI, Konsulat RI di negara-negara akreditasi dan rangkapannya. Tujuannya agar ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dapat dicegah di negaranya sebelum masuk ke Indonesia.
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab berikut ini akan diuraikan kajian dan penjelasan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa penulis untuk mengkaji variabel-variabel yang ada dalam disertasi berjudul “Strategi Internasionalisasi Pembinaan Pancasila Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Menangkal Ideologi Transnasional”. Variabel dimaksud seperti pengertian mengenai

pendidikan karakter, transnasionalisme, geopolitik & geostrategis, intermestik, berbagai jenis ideologi transnasional, ideologi Pancasila, internasionalisasi PIP dan WNI.

- c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN STUDI KASUS. Bab ini menjelaskan penggunaan rancangan penelitian dengan metodologi autoetnografi sebagai metode penelitian yang utama, dengan pendekatan studi kasus dalam pengalaman peneliti. Metode penelitian autoetnografi ini menghasilkan data deskriptif keterangan tertulis atau lisan dari responden, informan dan perilakunya yang diamati. Teknis dan proses analisis untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan 4 tahap: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Penarikan Kesimpulan. Tujuannya supaya diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu, masalah dan solusinya serta memperoleh perkembangan ke arah yang baik.
- d. BAB IV TEMUAN PENELITIAN. Dalam bab ini akan berisi berbagai hasil temuan kasus yang diperoleh dari triangulasi data (observasi, wawancara/quesioner, studi kasus) oleh peneliti di lapangan.
- e. BAB V PEMBAHASAN. Selanjutnya di bab ini akan melakukan analisis dan triangulasi data (observasi, wawancara/quesioner, studi kasus) juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di tempat dan waktu tertentu seperti dalam penelitian ini menganalisis merebaknya pengaruh ideologi transnasional di Indonesia dalam beberapa dekade.
- f. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI
 - 1) Penarikan simpulan, dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti proses reduksi data. Setelah cukup data terkumpul selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data cukup lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu mencari makna data yang terkumpul, perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif,

kabur dan diragukan. Tapi dengan bertambahnya data dari hasil wawancara dan hasil observasi serta dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian, maka kesimpulan itu harus diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori berdasarkan prinsip holistik dan ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data informasi yang sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.

- 2) Implikasi yang akan dikemukakan adalah mengenai *output* dan *outcome* dari pelaksanaan PIP kepada para WNI di luar negeri pada khususnya. Juga pengenalan ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif selain Komunisme, Radikalisme (kanan timur) dan Kapitalisme (kanan barat) kepada masyarakat di negara akreditasi sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi. Sehingga akhirnya tercipta kedamaian, ketenteraman, keamanan dan persatuan di Indonesia.
- 3) Rekomendasi yang akan diberikan dalam disertasi ini agar PIP dapat dilaksanakan secara integral, massif, terukur, terarah dan bersamaan /bergotong royong dengan melibatkan semua unsur *pentahelic* bangsa (pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, jurnalis dan masyarakat) Indonesia.